

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kata seks dan gender tentunya sudah tidak asing lagi didnegar namun kenyataannya masih banyak orang yang belum mengerti perbedaan antara keduanya. Seks mengacu pada konsep biologis dan sering diartika sebagai kelamin sedangkan gender merujuk pada karakteristik perempuan dan laki-laki dalam konsep social seperti norma, peran serta hubungan aatar perempuan dan laki-laki (WHO, 2018). Perbedaan karakteristik anatar perempuan dan laki-laki ini menciptakan pemikiran bahwa lakilaki dianggap lebih dari perempuan dalam banyak bidang yang pada akhirnya hal ini menimbulkan sebuah diskriminas gender.

Diskriminasi gender masih terjadi pada seluruh aspek kehidupan merupakan fakta yang tidak bisa dipungkiri. Ketimpangan gender dalam kesempatan dan kendali atas sumber daya, ekonomi, kekuasaan, dan partisipasi politik terjadi di mana-mana. Perempuan menanggung beban paling berat akibat ketidaksetaraan yang terjadi, namun pada dasarnya ketidaksetaraan itu merugikan semua orang (Bank Dunia, 2000). Padahal, pemberdayaan perempuan terutama dalam masalah ekonomi sangat perlu untuk pembangunan ekonomi, pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan (Harahap, 2014)..

Kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan merupakan masalah yang terjadi di hampir seluruh bagian dunia. Hal ini tercantum dalam tujuan ketiga dari delapan tujuan Milenium Development Goals (MDGs) yang telah dideklarasikan pada tahun 2000 oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Target dari MDGs ini

yaitu pada tahun 2015 seluruh negara anggota PBB diharapkan dapat mencapai kesejahteraan rakyat dan pembangunan masyarakat dengan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada tanpa diskriminasi gender.

Seiring berjalannya waktu, masalah ketimpangan gender ini pun belum sepenuhnya teratasi, hal ini berarti tujuan ketiga MDGs belum terpenuhi hingga saat ini meskipun sudah ada kemajuan yang cukup pesat dalam upaya penyetaraan gender. Melihat hal ini pastinya PBB mengambil langkah lain untuk tetap memperjuangkan kesetaraan gender yaitu dengan merancang SDGs (Sustainable Development Goals) dengan 17 butir tujuan sebagai langkah lanjutan dari MDGs yang hanya memiliki 8 butir tujuan. Penyetaraan gender terdapat pada tujuan kelima dari SDGs yang menggantikan tujuan ketiga MDGs.

Dalam ranah yang lebih sempit yaitu Indonesia, peningkatan peran perempuan di berbagai bidang kehidupan, pengintegrasian yang berbasis gender di semua tahapan pembangunan dan penguatan kelembagaan yang menaungi masalah gender, baik di level pusat maupun daerah menjadi sasaran dalam pembangunan nasional yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019. Untuk mencapai sasaran tersebut, tentu saja diperlukan indikator yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi pencapaian pembangunan dan pemberdayaan gender. Terdapat dua indikator penting untuk evaluasi pembangunan berbasis gender, yaitu Indeks Pemberdayaan Gender dan Indeks Pembangunan Gender (BPS & Kemenpppa, 2015).

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peran aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik (Badan Pusat Statistika). Hal tersebut ditunjukkan melalui data publikasi

dari Badan Pusat Statistika. Berdasarkan data tersebut penulis mempertimbangkan untuk mengangkat Pulau Sumatera sebagai objek penelitian karena belum maksimalnya pemberdayaan perempuan yang bisa kita lihat bahwa rata-rata IDG Pulau Sumatera masih jauh dari rata-rata IDG nasional.

Tabel 1. IDG Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2013-2017 (persen)

<i>/ Kabupaten /</i>	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)				
Kota	2013	2014	2015	2016	2017
Aceh	59.78	65.12	65.57	67.40	66.28
Sumatera Utara	70.08	66.69	67.81	69.07	69.29
Sumatera Barat	65.40	61.86	62.42	64.51	65.01
Riau	69.78	74.11	74.59	75.19	75.36
Jambi	66.19	61.93	62.43	63.14	65.32
Sumatera Selatan	70.41	70.20	70.36	70.69	73.53
Bengkulu	73.45	68.76	68.86	71.09	71.40
Lampung	65.62	62.99	62.01	61.98	63.60
Kep. Bangka Belitung	57.29	56.12	56.29	51.69	54.91
Kep. Riau	60.79	60.54	62.15	65.60	66.96
Sumatera	65.88	64.83	65.25	66.04	67.36
Indonesia	70.46	70.68	70.83	71.39	71.74

Sumber : Badan Pusat Statistika 2017

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 hingga 2017 rata-rata IDG pulau Sumatra berada dibawah rata-rata IG Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di Pulau Sumatra khususnya dibidang ekonomi dan politik masih sangat memprihatinkan. Meskipun ada bberapa provinsi yang

pada periode tertentu menunjukkan angka lebih dari rata-rata nasional seperti Bengkulu.

Selain IDG, ada juga indikator lain untuk menunjukkan ketimpangan gender yaitu IPG. Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pertumbuhan yang berkaitan dengan gender. Indeks Pembangunan Gender (IPG) mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tetapi menangkap ketidaksetaraan dalam pencapaian antara perempuan dan laki-laki (Badan Pusat Statistik). Bedanya dengan IDG adalah IDG hanya melihat pencapaian dibidang ekonomi dan politik sedangkan IPG melihat pencapaian dalam bidang yang lebih spesifik yaitu dalam bidang kesehatan, pendidikan dan standar hidup layak.

Meskipun menggunakan indikator yang sama namun pada dasarnya jika nilai IPG lebih kecil dibandingkan dengan nilai IPM maka dapat dipastikan adanya kesenjangan gender di daerah tersebut. IPG mengukur capaian pembangunan manusia yang telah memasukkan aspek disparitas gender. Nilai maksimal dari IPG di suatu wilayah tidak akan pernah melampaui nilai IPM-nya. Nilai IPG yang semakin jauh dari nilai IPM-nya memperlihatkan bahwa disparitas gender yang terjadi di wilayah pengamatan juga akan semakin tinggi pula (BPS & Kemenpppa, 2013).

Tabel 2. IPM dan IPG Menurut Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2015 (persen)

Provinsi	IPM	IPG	Selisih
Aceh	70.45	64.86	5.59
Sumatera Utara	70.24	63.89	6.39

Sumatera Barat	71.28	67.53	3.75
Riau	70.75	62.08	8.67
Jambi	69.11	61.12	7.99
Sumatera Selatan	68.55	63.22	5.34
Bengkulu	69.28	63.31	5.98
Lampung	67.50	60.68	6.83
Kep. Bangka Belitung	69.25	61.19	8.06
Kep. Riau	74.81	69.73	5.08
Sumatera	70.12	63.73	6.39
Indonesia	70.28	63.97	6.31

Sumber : BPS 2017 (diolah)

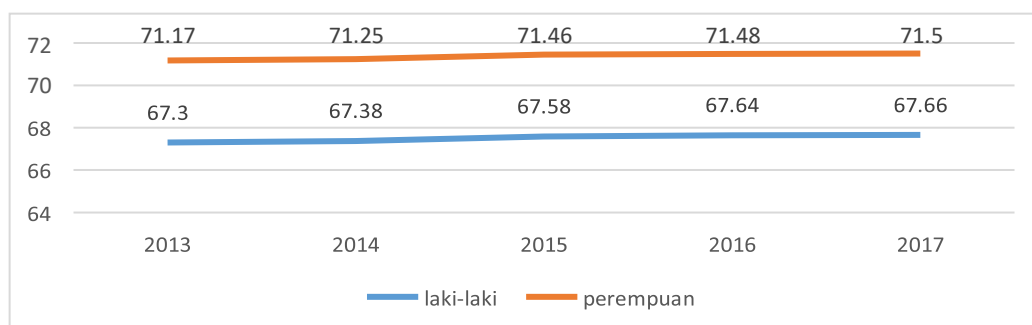
Berdasarkan hasil oleh pada tabel 2, dapat dilihat bahwasannya terdapat kesenjangan atau gap yang cukup berarti antara IPM dan IPG disetiap provinsinya. Pada tahun 2015, Sumatra Barat memiliki gap paling rendah bila dibandingkan dengan provinsi lainnya di Pulau Sumatra, sedangkan Riau memiliki gap paling besar yaitu sebesar 8,67 sehingga menunjukkan terjadinya kesenjangan paling besar di pulau Sumatra.

Pada Tabel 2 juga membuktikan bahwa provinsi-provinsi di Pulau Sumatera belum mampu mencapai tujuan MDGs yang berkaitan dengan kesetaraan gender serta pemberdayaan perempuan yang ditargetkan pada tahun 2015. Kesetaraan gender yang dimaksud adalah keadilan dalam menerima perlakuan dan tidak membedakan melalui hal yang bersifat kodrati, dalam konteks ini adalah gender. Namun kenyataannya untuk mencapai kesetaraan tersebut memang bukan hal yang mudah melihat budaya Indonesia yang masih sangat kental dan terutama

sepanjang Pulau Sumatera terdapat suku dan ras yang beragam dengan tradisi dan keyakinan yang berbeda-beda jadi untuk mewujudkan suatu kesetaraan berbasis gender ini masih tergolong sulit.

Adanya gap atau kesenjangan antara IPM dan IPG ini menjadi indikator bahwa ketimpangan gender masih terjadi baik dibidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi di Pulau Sumatera. Adapun indikator yang digunakan yaitu Angka Harapan Hidup (AHH) sebagai indikator dibidang kesehatan, Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) sebagai indikator dibidang pendidikan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebagai indikator dibidang ekonomi. Indikator-indikator tersebut nantinya akan melihat hubungannya masing-masing dengan Pendapatan Regional Bruto Perkapita.

Menurut Bustomi (2012), pendidikan dan kesehatan merupakan tujuan pembangunan yang mendasar. Kesehatan merupakan salah satu modal manusia (*human capital*) yang sangat diperlukan dalam menunjang pembangunan ekonomi. Hal ini dikarenakan kesehatan merupakan salah satu faktor paling penting yang menunjang peningkatan produktivitas. Indikator pembangunan kesehatan dapat dilihat melalui Angka Harapan Hidup (AHH).

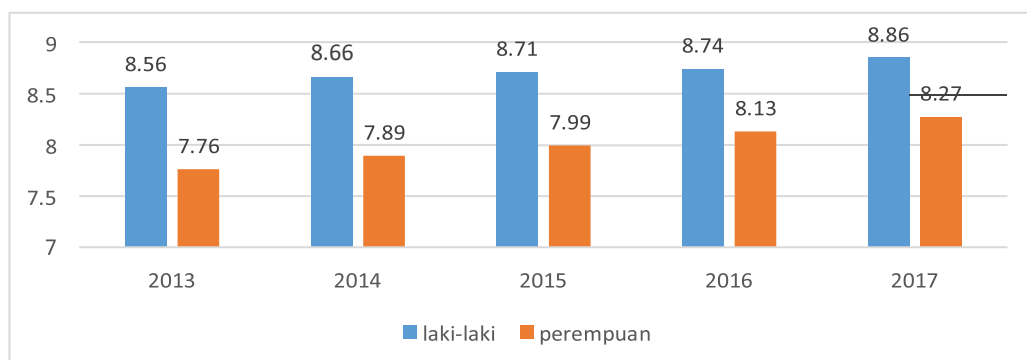


Gambar 1. Angka Harapan Hidup Laki-Laki dan Perempuan tahun 2013-2017

Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa AHH perempuan dan AHH laki-laki menunjukkan tren yang terus meningkat meskipun tidak signifikan. AHH laki-laki terlihat selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan AHH perempuan. Hal ini membenarkan sebuah teori yang mengatakan bahwa umur perempuan relatif lebih panjang dari umur laki-laki. AHH yang selalu meningkat ini juga bisa menggambarkan berhasilnya layanan kesehatan menyentuh berbagai kalangan melalui berbagai program seperti BPJS, asuransi dan lainnya sehingga meningkatkan Angka Harapan Hidup di Indonesia.

Selain itu, pendidikan juga menjadi indikator yang kuat untuk kinerja ekonomi. Oleh karena itu, ketimpangan pendidikan dapat memberikan kontribusi yang signifikan pada kesenjangan (Idzalika, 2015). Indikator pendidikan ini dapat dilihat dari angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS). Mawarni (2017) dalam analisisnya menyatakan bahwa semakin rendah tingkat ketimpangan gender dibidang pendidikan maka hal tersebut dapat meningkatkan pendapatan suatu daerah.

Gambar 2. Rata Lama Sekolah Laki-Laki dan Perempuan tahun 2013-2017

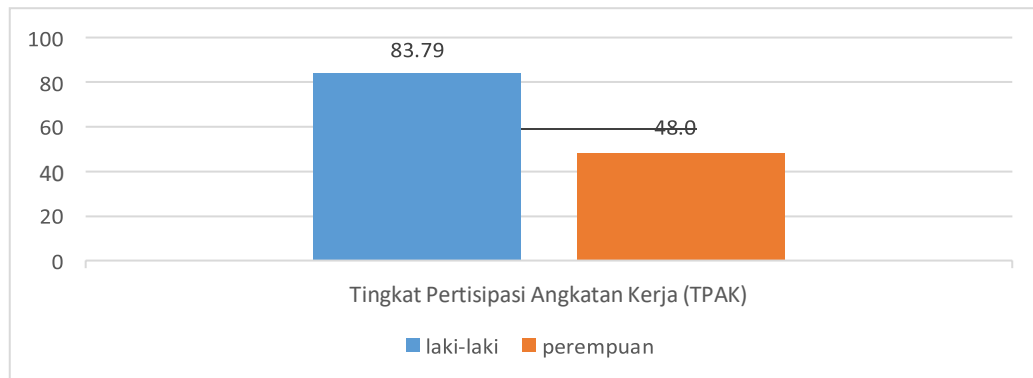


Dari gambar 2 dapat dilihat bahwa Rata-Rata Lama Sekolah baik laki-laki maupun perempuan selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, dapat dilihat juga, ternyata masih cukup tinggi kesenjangan pada bidang pendidikan antara laki-laki dan perempuan di Indonesia. Sebagai salah satu indikator yang sangat penting, melihat hasil yang seperti ini merupakan pertanda yang kurang baik bagi pertumbuhan ekonomi di Pulau Sumatera jika dilihat dari sisi ketimpangan bidang pendidikannya.

Selain kesehatan dan pendidikan, ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan akan berdampak negatif pada ekonomi. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Klasen dan Lamanna (2009) memperlihatkan bahwa ketimpangan dalam kesempatan kerja menghambat pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan ekonomi yang hilang akibat ketimpangan gender dalam ketenagakerjaan sekitar 4 kali lebih besar dibandingkan ketimpangan gender dalam pendidikan.

Disisi lain, penelitian yang dilakukan oleh Gumbel (2004) menyatakan bahwa, ketimpangan dalam pekerjaan memiliki efek negatif, meskipun dalam beberapa kasus efek ini mungkin positif. Pada penelitian ini masih muncul kemungkinan bahwa adanya ketimpangan dalam kesempatan kerja antara laki-laki dan perempuan di beberapa kasus tertentu. Meskipun demikian, ketimpangan dalam pekerjaan merupakan faktor yang harus diperhitungkan ketika meneliti hubungan antara ketimpangan dan pertumbuhan.

Gambar 3. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja menurut jenis kelamin.



Dalam hal ini kita juga bisa melihat bahwa masih ada kesenjangan yang cukup berarti antara TPAK laki-laki dan perempuan di Indonesia pada tahun 2015. Persentase TPAK laki-laki sebesar 83.79% sedangkan perempuan sebesar 48.09%, artinya masih ada gap diantara keduanya sebesar 35.70%. Dengan gap sebesar 35.70% berarti kesenjangan dari segi tenaga kerja di Pulau Sumatera bisa dipastikan masih cukup tinggi.

Provinsi	PDRB per Kapita (ribu rupiah)		Laju Pertumbuhan (%)
	2014	2015	
Aceh	23129,04	22524,31	-2.61
Sumatera Utara	30477,07	31637,41	3.81
Sumatera Barat	25982,83	27080,76	4.23
Riau	72390,88	70769,78	-2.24
Jambi	35878,09	36753,52	2.44
Sumatera Selatan	30636,27	31549,3	2.98
Bengkulu	19626,72	20302,48	3.44
Lampung	23647,27	24581,78	3.95
Kep. Bangka Belitung	32859,64	33480,38	1.89

Kep. Riau	76313,81	78625,43	3.03
-----------	----------	----------	------

Tabel 3. PDRB per Kapita dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi di Pulau Sumatera 2015

Sumber : BPS (diolah)

Pada Tabel 3 dapat dilihat bahwa PDRB per kapita cenderung mengalami kenaikan hampir disetiap provinsi di Pulau Sumatera. Namun meskipun begitu masih terdapat penurunan di dua provinsi yaitu Provinsi Aceh dari 23129.04 ribu rupiah menjadi 22524.31 ribu rupiah atau turun sebesar 2.61% dan Provinsi Riau dari 72390.88 ribu rupiah menjadi 70769.78 ribu rupiah atau turun sebesar 2.24%. Masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini menunjukkan adanya selisih angka antara perempuan dan laki-laki yang berarti adanya perbedaan pencapaian antara keduanya. Secara empiris, penelitian-penelitian sebelumnya membuktikan bahwa adanya ketimpangan pencapaian antara laki-laki dan perempuan berdampak tidak baik bagi sumbangsih Pendapatan Perkapita.

A. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka penulis merumuskan masalah ialah Bagaimana Rasio Angka Harapan Hidup, Rasio Rata Lama Sekolah, dan Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja berpengaruh pada Produk Domestik Regional Bruto Perkapita di Indonesia ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menganalisis pengaruh Rasio Angka Harapan Hidup, Rasio Rata Lama Sekolah, dan Rasio Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terhadap PDRB Perkapita. .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait

1. Bagi penulis untuk menempuh gelar sarjana S1 Ekonomi Pembangunan di Universitas Muhammadiyah Malang.
2. Bagi Pemangku Kebijakan supaya dapat mempertimbangkan kebijakan yang tepat dalam mengeluarkan kebijakan khususnya dalam mengentaskan permasalahan ketimpangan gender di Indonesia.
3. Bagi para pembaca agar dapat menambah ilmu pengetahuan dan mengembangkan ilmu serta menjadi referensi bagi yang ingin melakukan penelitian.

E. Batasan Penelitian

Agar pembahasan penelitian ini lebih fokus dan tidak melebar adapun batasan masalah pada penelitian ini maka variabel – variabel yang digunakan adalah rasio angka harapan hidup, rasio rata lama sekolah, dan rasio tingkat partisipasi Angkatan kerja di setiap provinsi di Indonesia sedangkan untuk pembatasan waktu penelitian dimulai dari tahun 2016 hingga tahun 2020.

